



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

# bangga  
melayani  
bangsa  
**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaborasi



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# TAHUN 2025



Nomor : 000.7.2/0039/300.5

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2025**



## **PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 guna mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini termuat gambaran hasil capaian kinerja semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja di awal tahun selama kurun waktu satu tahun.

Dengan demikian dapat dilihat tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan analisis dan evaluasi diharapkan dapat mengoptimalkan peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda pada tahun-tahun selanjutnya

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan harapan ditahun-tahun mendatang asistensi dan kerjasama tetap berlanjut.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karenanya kami mengharapkan saran, rekomendasi dan kritikan untuk perbaikan dokumen.



Pada akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh jajaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi bagian dari Instansi teknis Pemerintah Kota Samarinda.

Samarinda, 9 Februari 2026

Tim Penyusun

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kota Samarinda



**YOSUAJADEN, S.STP.,M.Si**

NIP. 19830525 200112 1 003



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai amanat bagi organisasi dalam mempertanggungjawabkan atas pelaporan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Pencapaian kinerja dalam penyusunan LKjIP ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah disepakati pada tahun 2025 **telah berhasil dicapai**.

Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025, menunjukkan bahwa capaian masuk 100% pada kategori **Sangat Tinggi**. Pencapaian IKU pada sasaran Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial dengan indikator kinerja Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial **meningkat** dengan realisasi pencapaian kinerja sebesar 90,54% atau (4,69%) dari target capaian kinerja Renstra sebesar 95%, untuk target capaian kinerja 100% dan realisasi capaian kurang dari target yakni sebesar 95,31%.

Solusi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut :



- a. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang serta dukungan dana yang cukup untuk keberhasilan program dan kegiatan secara berkesinambungan;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis;
- c. Optimalisasi koordinasi antar instansi terkait;
- d. Memperluas jaringan komunikasi dan informasi masalah-masalah strategi;
- e. Optimalisasi pemberdayaan terhadap forum-forum (FKUB, FPK dan FKDM).

Semoga LKjIP Badan Kesbangpol Kota Samarinda Tahun 2025 ini dapat menjadikan tolak ukur untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan ditahun yang akan datang.





## DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Gambaran Umum .....	
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
2. Struktur Organisasi .....	6
3. Sumber Daya Manusia .....	15
4. Sarana dan Prasarana .....	17
E. Isu Strategis .....	
1. Aspek strategis Organisasi .....	18
2. Permasalahan Utama .....	19
a. Faktor Internal .....	20
b. Faktor Eksternal .....	20
F. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda 2025-2029 .....	25
1. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih .....	26
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	27
3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	28
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029 .....	29



C.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 .....	31
D.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	31
E.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	39
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
A.	Capaian Kinerja Organisasi .....	41
1.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	42
2.	Perbandingan Realisasi Kinerja serta dan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Sebelumnya .....	43
3.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah pada Rancangan Strategis .....	45
4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/ Internasional .....	45
5.	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja .....	46
6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) .....	50
7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) .....	53
B.	Realisasi Anggaran .....	66
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>75</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2025-2029 dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sebagai bentuk perwujudan untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025. Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja



berdasarkan tujuan dan sasaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mengupayakan peran aktif, kerjasama, tanggungjawab dan kerja keras setiap unsur aparatur/staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang dipergunakan sebagai modal dasar didalam mengemban visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 mengacu pada :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP;
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Samarinda;
5. Surat Deput RB Kunwas Kementerian PANRB Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025;

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memenuhi kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan instansi



pemerintah di Kota Samarinda adapun Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur baik yang telah dilaksanakan atau sebelumnya kepada kepala Daerah.
2. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan pelayanan atau perbaikan penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

#### **D. GAMBARAN UMUM**

##### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

###### **Tugas Pokok**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah guna melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menyelenggarakan kegiatan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik dalam negeri yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan teknis propinsi

###### **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan,



pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.

- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif.
- c. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.

## **2. Struktur Organisasi**

1. Susunan Organisasi OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekertaris
  - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - d. Bidang Kewaspadaan Nasional
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
  - f. Bidang Politik Dalam Negeri
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjafung)

- a. Kepala Badan

Membawahi :

- 1) Sekretaris
- 2) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- 3) Bidang Politik Dalam Negeri
- 4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi
- 5) Bidang Kewaspadaan Nasional

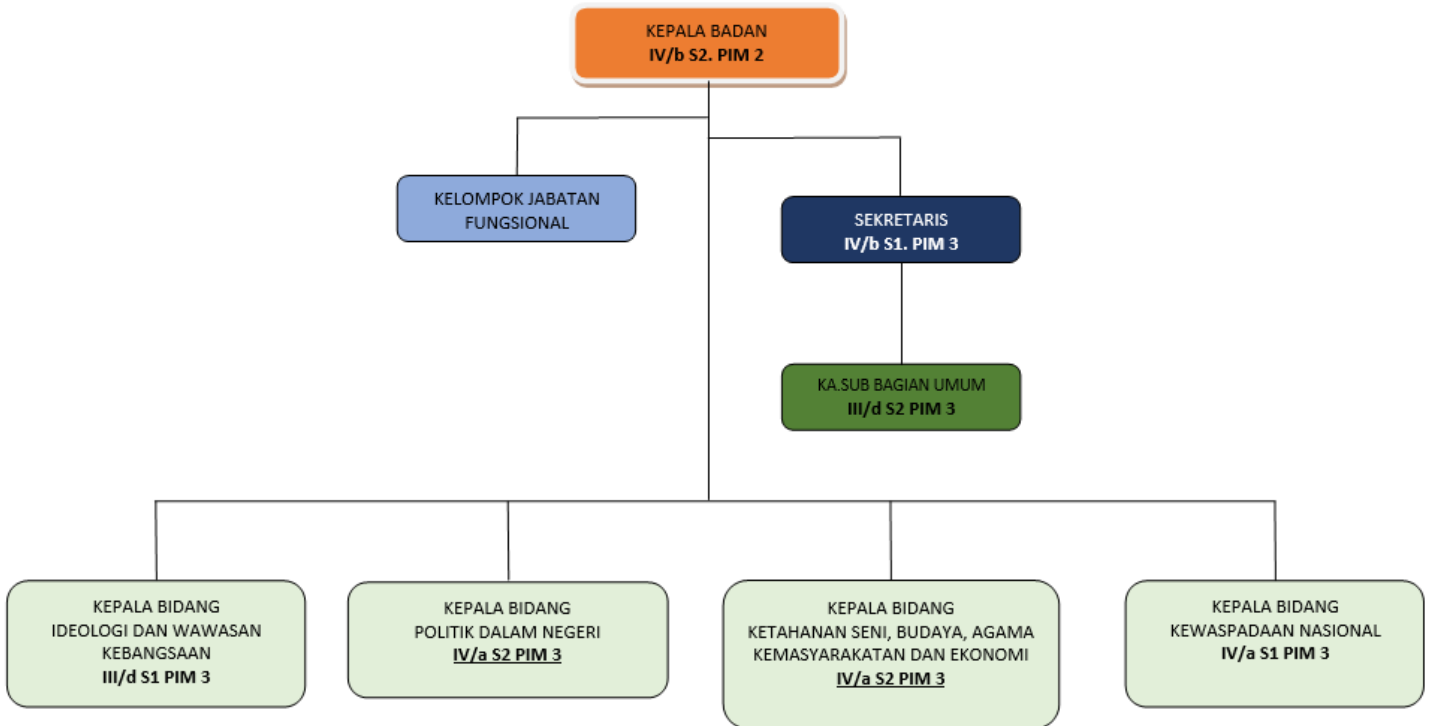


- 6) Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjafung)
  - a) Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
  - b) Jafung Perencana Ahli Muda
  - c) Jafung Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - d) Jafung Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik dan Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu
  - e) Jafung Ketahanan Seni dan Budaya, Agama Masyarakat dan Ekonomi
  - f) Jafung Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing dan Penanganan Konflik
- b. Sekretaris membawahi :
  - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat digambarkan sebagai berikut:



## STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA





Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:

**a. Kepala Badan**

1. Kepala Badan mempunyai tugas yaitu :

Memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya teknis operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan menyelenggarakan kegiatan penetapan kegiatan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi serta politik dalam negeri sesuai norma, standar, prosedur, kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku searah kebijakan umum daerah.

2. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.

b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif.

c. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.



**b. Sekretaris Badan**

1. Sekretaris Badan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, asset, penyusunan program, laporan dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan pelaksanaan program-program kegiatan kedinasan dan kesekretarian serta penginformasian ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Membaca / meneliti / mempelajari seluruh surat masuk dan dokumen lainnya;
  - c. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian dokumen anggaran serta memparaf pertanggungjawaban terhadap sirkulasi dokumen keuangan untuk kelancaran penggunaan dan pengelolaan anggaran keuangan berdasarkan DPA;
  - d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan teknis kesekretarian dan kerumahtanggaan serta teknis bidang-bidang;
  - e. Mengatur penyiapan dan pembinaan kegiatan perencanaan pengumpulan data dan pembuatan statistik kemajuan dalam pemberian pelayanan umum kesekretarian dan kegiatan kedinasan lainnya;
  - f. Mengatur penyiapan dan pembinaan administrasi kepegawaian, kearsipan, pengadministrasian barang-barang inventaris, surat-menyurat serta penatausahaan seluruh perjalanan dinas;
  - g. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kesekretarian dan kerumahtanggaan Badan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran tugas



kedinasan bilamana ada perubahan kebijakan agar diajukan terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan dan mendapat arahan lebih lanjut;

- h. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kajian dan kebijakan lebih lanjut serta sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun LKjIP.

3. Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 1 (satu) sub bagian yaitu :

**Subbag Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a. Memberi arahan dan pembagian tugas bawahan selaku pengadministrasi agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar berjalan tertib, lancar dan terkendali;
- b. Melaksanakan urusan surat-menyurat pengetikan, penggandaan, kearsipan, dan pemeliharaan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana berkenaan dengan urusan tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa, dan kedudukan hukum pegawai;
- f. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi : bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- g. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan kedinasan serta fasilitasi lainnya;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;



- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Sekretaris sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

**c. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa,**

1. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
2. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemantauan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diarahkan oleh Kepala Badan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi Ketahanan Ideologi Negara, Pelaksanaan Bela Negara, Penghayatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan, pembinaan pembaruan dan kewarganegaraan sesuai arahan Kepala Badan yang merujuk pada kebijakan teknis Badan dan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku selaras dengan kebijakan umum daerah;
  - c. Melaksanakan pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan unsur lingkup badan maupun unsur OPD terkait dalam mengaktualisasikan dan pengintegrasian perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan kedinasan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan Kepribadian Bangsa, Kewarganegaraan, Kepedulian Sosial dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan secara terpadu dan terkendali agar tetap kondusif sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria



- dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diarahkan Kepala Badan selaras dengan kebijakan umum daerah;
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai nonstruktural dan/atau pejabat fungsional baik sebagai fungsional tertentu maupun fungsional umum selaku pengadministrasi dan/atau selaku petugas operasional umum dan /atau teknis agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga kegiatan program dapat berjalan lancar, sinergis dan terintegrasi dengan program umum Badan;
  - e. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan Program Wawasan Kebangsaan serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran masukan atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas, bilamana ada perubahan kebijakan agar terlebih dahulu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut;
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berjenjang, pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas - tugas teknis dan non teknis aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kinerja Badan;
  - h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**d. Kepala Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri,**

1. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.
2. Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program strategi bidang Politik terkait Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik serta Kelembagaan Partai Politik dan fasilitasi Pemilu;
  - b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemantauan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Politik Dalam Negeri;
  - c. Menyusun rencana kerja dan program operasional kerja dalam melaksanakan perhimpunan peraturan yang berkaitan dengan bidang Politik Dalam Negeri;
  - d. Menyiapkan, merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan pemfasilitasi, monitoring dan evaluasi dalam Pengimplementasian Kebijakan Publik, Kelembagaan Kemasyarakatan dan Partai Politik, Pendidikan Budaya Politik Dalam Negeri;
  - e. Mengkoordinasikan sinkronisasian dan harmonisasi baik dengan unsur lingkup Badan maupun dengan unsur OPD terkait dan unsur Instansi Vertikal lainnya dalam upaya mengaktualisasikan dan pengintegrasian perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan kedinasan di bidang Politik Dalam Negeri;
  - f. Mengkoordinasi monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atau pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan Menyusun hasil kinerja OPD;
  - g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**e. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi**

- 1 Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas dan ormas asing.
- 2 Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
  - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi



Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;

- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**f. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional,**

1. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota.
2. Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
  - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
  - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;



- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
- e. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda tidak mengangkat dan menunjuk Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Sumber Daya Manusia**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2025, memiliki jumlah pegawai sebanyak 65 orang, yang terdiri dari 34 orang ASN, 4 orang PPPK, 24 orang PPPK Paruh Waktu, 2 orang petugas kebersihan, dan 1 orang security. Untuk mengetahui gambaran umum komposisi aparatur adalah sebagai berikut :



Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Uraian	Jumlah
1	ASN	34
2	PPPK	4
3	PPPK Paruh Waktu	24
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>

Tabel 2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN	PPPK	PPPK Paruh Waktu	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	-	-	-	-	0
2.	SLTP	1	-	-	1	1
3.	SLTA	14	-	14	28	28
4.	D.I	-	-	-	-	-
5.	D.II	-	-	-	-	-
6.	D.III	2	-	-	2	2
7.	Sarjana ( S1)	12	4	9	25	25
8.	Pasca Sarjana (S2)	5	-	1	6	6
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>62</b>	<b>62</b>

Sumber data : Umum dan Kepegawaian

Tabel 3 Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	I	-	-
2.	II	13	13
3.	III	16	16
4.	IV	5	5
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>34</b>

Sumber data : Umum dan Kepegawaian



Tabel 4 Pegawai Berdasarkan Penempatan dimasing-masing Bidang

No.	Bidang	Jabatan	Jumlah
1.	Pimpinan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	1 Orang
2.	Sekertariat	Sekertaris	1 Orang
		Subbag	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	21 Orang
3.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	0 Orang
		Staf	6 Orang
4.	Bidang Politik Dalam Negeri	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	0 Orang
		Staf	8 Orang
5.	Bidang Ekososbud	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	7 Orang
6.	Bidang Kewaspadaan Nasional	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	10 Orang
<b>Jumlah</b>			<b>62</b>

#### 4. Sarana Dan Prasarana

Guna mendukung kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah pula dilengkapi dengan sarana dan prasarana baik dalam bentuk aktiva tanah dan bangunan, kendaraan dinas, inventaris serta fasilitas lainnya. Kesemua sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya.



Tabel 5 Sumber daya Sarana Dan Prasarana

No	Bidang	Nilai Aktiva (Rp)
1.	Tanah	0,-
2.	Peralatan dan Mesin	10.707.425.480,-
3.	Gedung dan Bangunan	1.780.011.750,-
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,-
5.	Aset Tetap Lainnya	5.000.000,-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-
7.	Aset Lainnya	885.240.000,-
<b>Jumlah Nilai Asset (Per 31 Desember 2025)</b>		<b>12.492.437.230,-</b>

Sumber data : REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Infrastruktur pendukung lainnya yang juga diperlukan berupa sarana dasar seperti listrik, air bersih dan sarana telekomunikasi.

## E. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda isu strategis yang akan di capai mengacu pada isu strategis Renstra 2025-2029 yakni :

1. Maraknya paham/Ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila sebagai akibat akses informasi yang bebas.
2. Paham radikalisme dan terorisme.
3. Belum optimalnya upaya deteksi dini potensi konflik di masyarakat.
4. Masih kurangnya peran aktif Ormas dalam kegiatan pembangunan.
5. Penyalahgunaan narkoba.

### 1. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sesuai Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta



standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai salah satu komponen yang memiliki kewenangan urusan pemerintah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kota Samarinda dalam hal penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial, ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri maupun di bidang ketahanan ekonomi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ikut berupaya menangani masalah-masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum dimasyarakat seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta memfasilitasi pembentukan komunitas intelegen di daerah dengan melibatkan instansi terkait di Daerah. Pembentukan forum-forum tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri di daerah.

Terkait dengan tugas lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memverifikasi bantuan untuk Partai Politik ataupun Organisasi, memberikan Surat Keterangan Melapor (SKM) bagi organisasi, rekomendasi untuk ijin keramaian, rekomendasi pemasangan spanduk dan rekomendasi penelitian.

Untuk itu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.

## **2. Permasalahan Utama**

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja OPD, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut :



**a. Faktor Internal**

1) Kekuatan

- Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
- Adanya Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- Pola kepemimpinan yang mempunyai wawasan pandangan serta mempunyai strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi pemerintah kota Samarinda.
- Adanya Sinergitas dan kondusivitas dari berbagai pihak (baik mitra maupun Stakeholder).
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur untuk dapat memenuhi target dari masing-masing Bidang maupun sub bagian.
- Peningkatan kinerja dan motivasi kerja Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

2) Kelemahan

- Belum optimalnya Sinergitas dan kondusivitas dari berbagai pihak (baik mitra maupun Stakeholder).
- Belum optimalnya komitmen yang kuat dari aparatur untuk dapat memenuhi target dari masing-masing Bidang.
- Belum optimalnya Peningkatan kinerja dan motivasi kerja Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda secara maksimal.

**b. Faktor Eksternal**

1) Peluang

- Stabilitas daerah yang cukup kondusif
- Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi
- Banyaknya organisasi di masyarakat
- Kerjasama yang baik antar instansi vertikal
- Tersedianya pedoman untuk acuan



## 2) Ancaman

- Adanya potensi terjadinya konflik
- Di Era globalisasi arus informasi dan masuknya budaya asing, telah merubah mental, sikap dan perilaku generasi muda dalam memahami wawasan kebangsaan lambat laun semakin terkikis dapat merubah generasi muda bergaya hidup modern dan jauh dari norma-norma budaya bangsa.
- Kenakalan remaja dan Narkoba

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menimbulkan tantangan tersendiri bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota. Adapun *permasalahan* yang dihadapi selama tahun 2025, antara lain :

1. Pertambahan penduduk yang sangat cepat sehingga kesulitan memonitor aktifitas masyarakat secara optimal.
2. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik masih kurang.
3. Kesenjangan ekonomi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial
4. Letak wilayah Samarinda seperti daerah pegunungan dapat menghambat dalam memantau kegiatan masyarakat.
5. Penegakan hukum terhadap pelanggar hukum masih tebang pilih.
6. Pembangunan daerah kurang memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

## F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri 4 (empat) bab yaitu:

### **Bab I : Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2025, isu strategis, aspek strategis,



permasalahan utama organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja.

## **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Perencanaan Kinerja Memuat perencanaan strategis 2025-2029 indikator kinerja utama 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan 2025 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

## **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



**b. Realisasi Anggaran.**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV : Penutup**

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

**Lampiran – Lampiran** : Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan dibutuhkan oleh setiap instansi pemerintah, dalam hal pelaksanaan pembangunannya mengacu pada beberapa dokumen perencanaan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan sekaligus penyempurnaan SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda pada tahun 2025 membuat rencana strategis (Renstra) periode 2025-2029 dilakukan penyempurnaan pada rumusan misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja beserta targetnya. Selanjutnya Renstra revisi tersebut menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran serta pemantauan kinerja.

#### **A. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA 2025-2029**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4). Maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan sampai kepada pengukuran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menyusun Rencana Strategis merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2025-2029 dalam menghadapi berbagai persoalan/tantangan yang akan dihadapi.



## 1. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Agar cara pandang jauh kedepan dan apa yang akan dicapai dapat eksis, antisipasi, dan inovatif maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Visi sebagai berikut :

***“Samarinda Maju untuk Kaltim maju”***

Dan untuk mewujudkan Visi diatas maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Misi antara lain :

### MISI 1

- Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing.

### MISI 2

- Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

### MISI 3

- Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

### MISI 4

- Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis.

### MISI 5

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, untuk mencapai visi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 melaksanakan misi ke 4 (tiga) yaitu ***“Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis”***.



## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai visi dan misi untuk kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah :

1. Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

### **Sasaran Strategis**

Dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sasaran strategi dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kualitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Utama selama 2025 – 2029 dapat dideskripsikan sebagai berikut:



Tabel : 2.1

Hubungan Visi, Misi Walikota dengan Sasaran dan Tujuan OPD

<b>VISI :</b> <i>Samarinda Maju untuk Kaltim Maju</i>		<b>RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029</b>
<b>Misi :</b> <i>Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis</i>		
<b>Tujuan</b> <i>Terwujudnya kota layak huni yang aman, bersih dengan infrastruktur yang berkualitas</i>		
<b>Sasaran</b> <i>Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Tangguh</i>		
No.	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2025-2029

### 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menetapkan strategi dan arah kebijakan yang digambarkan pada table berikut :

Tabel : 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>VISI WALIKOTA SAMARINDA 2025-2029</b>		<i>Samarinda Maju untuk Kaltim Maju</i>		
<b>MISI – 4</b>		<i>Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis</i>		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Membangun sinergi dan kerjasama Masyarakat dengan Pemerintah dalam melakukan pembangunan di Kota Samarinda	<p>Mengembangkan kebijakan yang didasarkan pada analisis situasi dan kondisi daerah serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses perumusannya</p> <p>Meningkatkan kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada</p> <p>Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi</p> <p>Mengembangkan sistem informasi</p>



				dan komunikasi yang modern untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
				Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah, serta menjaga dialog yang konstruktif antara pemerintah dan Masyarakat
				Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat internasional dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga stabilitas politik

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2025-2029

Tabel : 2.3  
 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke					Kondisi Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		<b>Indikator Tujuan :</b> Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas	66%	66,65%	71%	75%	78%	80%	
		Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	<b>Indikator Sasaran :</b> Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	100%	95%	96%	97%	98%	99%	99%

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2025-2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2025-2029

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :



Tabel : 2.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Renstra dan Target Kinerja  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025

VISI WALIKOTA SAMARINDA 2025-2029		Samarinda Maju untuk Kaltim Maju						
MISI – 4		Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis						
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Formulasi	Definisi Operasional	Satuan	Target
1	Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Indikator ini dipilih untuk mengukur jumlah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	<p>Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial</p> $= \frac{P1 + P2 + P3 + P4 + P5}{5} \times 100$ <p>P1 = Persentase Program 1 P2 = Persentase Program 2 P3 = Persentase Program 3 P4 = Persentase Program 4 P5 = Persentase Program 5</p> <p>P1 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dibagi target peserta x 100% P2 = Realisasi jumlah Masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Politik dibagi target peserta x 100% P3 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Ormas dibagi target peserta x 100% P4 = Realisasi jumlah Masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada pelaku ekonomi, sosial, budaya dan agama dibagi target peserta di kali 100% P5 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam penyelesaian konflik dibagi target jumlah masyarakat, yang berpotensi terlibat konflik di kali 100%</p>	Definisi ini mengukur pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan masyarakat yang beraktifitas di lingkungan Pendidikan, Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dalam rangka mencegah terjadinya Konflik	%	95%

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



**C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah seperti tabel berikut:

Tabel : 2.5

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Target Kinerja  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	95%

**D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Walikota Samarinda selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel ; 2.6

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	95%



Tabel ; 2.7

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800 Orang	Pelaksanaan Sosialisasi dengan jumlah Peserta 800 orang	100%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 Laporan	Pelaksanaan Monev. 8 kali	100%
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Jumlah Paskibraka	300 Orang	Seleksi Pembentukan Paskibraka Peserta 260 orang Calon Paskibraka 40 orang	100%
		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	42 Orang	Pengukuhan Pelaksana DPPI dengan jumlah peserta 42 orang	100%
2	★	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	Bantuan untuk 10 Partai Politik	100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2500 Orang	Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Politik dengan jumlah Peserta 2500 orang	100%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	Pemantauan, Perkembangan Politik Daerah (TP3D) 45 Orang (1 tim) 12 laporan	100%



3	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang	Pelaksanaan Sosialisasi untuk Ormas dengan jumlah peserta 600 orang	100%
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Laporan	Monitoring dan Evaluasi 50 kali	100%
4	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	Pelaksanaan Sosialisasi P4GN dengan jumlah Peserta 600 orang	100%
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Laporan	Monitoring dan Evaluasi 30 Laporan	100%
5	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1500 Orang	Pelaksanaan Sosialisasi dengan jumlah Peserta 710 orang	47,33%
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik 12 kali pelaksanaan	85,71%
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Pelaksanaan Rapat FORKOPIMDA 12 kali	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



Tabel ; 2.8  
Perjanjian Kinerja Murni Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.421.161.000	APBD 2025
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.277.910.000	
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	263.728.000	
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.284.255.000	
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.157.175.000	
<b>Jumlah</b>		<b>11.404.229.000</b>	

Pada tahun 2025, terjadi perubahan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sehingga Perjanjian Kinerja diubah sesuai pagu APBD Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda hal ini *disebabkan adanya penambahan pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (Hibah untuk Polda Kaltim)*. Sedangkan untuk sasaran dan indikator kinerja juga mengalami perubahan. Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel ; 2.9  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.813.860.000	APBD-P 2025
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.028.287.905	
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	220.130.375	
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.139.995.250	
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5.282.330.000	
<b>Jumlah</b>		<b>15.484.603.530</b>	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP (0541) 733033 FAX (0541) 746157  
S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR Kode Pos : 75121

Laman : [kesbangpol.samarindakota.go.id](http://kesbangpol.samarindakota.go.id) email: [bakesbangpol.samarinda@gmail.com](mailto:bakesbangpol.samarinda@gmail.com)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOCHAMMAD ARIF SUROCHMAN, S,STP

Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : ANDI HARUN

Jabatan : WALIKOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut Pihak Kedua :

Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran penjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Februari 2025

Pihak Kedua  
  
ANDI HARUN

Pihak Pertama  
  
MOCHAMMAD ARIF SUROCHMAN, S,STP  
NIP. 19840819 200212 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA SAMARINDA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan serta Penguatan Konflik sosial	100%


	Program		Anggaran
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.	2.421.161.000,-
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	5.277.910.000,-
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	263.728.000,-
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp.	1.284.255.000,-
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	2.157.175.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>11.404.229.000,-</b>

Samarinda, 3 Februari 2025

PIHAK KEDUA

  
  
**ANDI HARUN**

Plt. KEPALA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KOTA SAMARINDA

  
**MOCHAMMAD ARIF SUROCHMAN, S,STP**  
 NIP. 19840819 200212 1 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP (0541) 733033 FAX (0541) 746157  
S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR Kode Pos : 75121  
Laman : [kesbangpol.samarindakota.go.id](http://kesbangpol.samarindakota.go.id) email: [bakesbangpol.samarinda@gmail.com](mailto:bakesbangpol.samarinda@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si  
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : ANDI HARUN  
Jabatan : WALIKOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut Pihak Kedua :

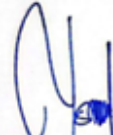
Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 14 Nopember 2025

PIHAK KEDUA  
  
ANDI HARUN  


Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si  
NIP. 19830525 200112 1 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA SAMARINDA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	95%

**Program**

**Anggaran**

1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.	3.813.860.000,-
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	5.028.287.905,-
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	220.130.375,-
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp.	1.139.995.250,-
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	5.282.330.000,-

**Jumlah**

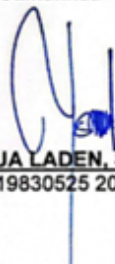
**Rp. 15.484.603.530,-**

Samarinda, 14 Nopember 2025

PIHAK KEDUA



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
**YOSUA LADEN, S.STP., M.SI**  
 NIP. 19830525 200112 1 003



**E. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.10  
Program dan Kegiatan Tahun 2025  
Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
					Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
					Pembentukan Paskibraka
2.			<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
					Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah



					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4	Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Samarinda.

Suatu kewajiban setiap OPD untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) dimana laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja organisasi merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel : 3.1  
 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 – 70	Baik
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai)
6	C	> 30 – 50	Kurang
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang



Capaian Kinerja Organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja tersebut mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi antara lain :

1. Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut adalah :

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.2  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori	Sumber Data
Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		<b>Indikator Tujuan :</b> Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas	66,65%	66,65%	100%	Sangat Memuaskan	Badan Kesbangpol Kota Samarinda
	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	<b>Indikator Sasaran :</b> Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	95%	90,76%	95,54%	Sangat Memuaskan	
<b>Rata-rata capaian sasaran strategis</b>					<b>95,54%</b>	<b>Sangat Memuaskan</b>	



Capaian kinerja target sasaran strategis dari indikator tujuan/sasaran mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 90,76% atau kurang dari (4,24%) dari target capaian kinerja 95% pada tahun 2025.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial

$$= \frac{P1 + P2 + P3 + P4 + P5}{5} \times 100$$

P1 = Persentase Program 1

P2 = Persentase Program 2

P3 = Persentase Program 3

P4 = Persentase Program 4

P5 = Persentase Program 5

$$= \frac{100+100+100+100+77,68}{500} \times 100$$

$$= \frac{477,68}{500} \times 100$$

$$= 95,54\%$$

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

Capaian tujuan dan sasaran organisasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja, capaian kinerja dengan realisasi, capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut :



Tabel. 3.3  
Realisasi dan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2025)	Capaian Kinerja			Target 2026	Kondisi Akhir Renstra	Capaian Renstra s.d 2025
			2023	2024	2025			
Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	95%	94,07%	100%	95,54%	96%	99%	57,92%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja tahun 2025 telah realisasi sebesar 95,54% yakni pada indikator kinerja : Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Disertai Dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial. Hal Ini dikarenakan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan ada yang tidak memenuhi target yakni pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial ini disebabkan anggaran kegiatan hibah lebih besar dari pada anggaran sub kegiatan koordinasi/sosialisasi dibidang Kewaspadaan Nasional.

Capaian organisasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja, capaian kinerja dengan realisasi, capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut :



Tabel. 3.4  
 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Peningkatan Capaian	Kondisi Akhir Renstra
Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	2023	94,07%	94,07%	5,93%	100%
		2024	100%	100%	0%	100%
		2025	90,76%	95,54%	4,24%	99%

Capaian organisasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja, capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.5  
 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Akhir Renstra	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja			Peningkatan Capaian
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	99%	94,07%	100%	90,76%	94,07%	100%	95,54%	57,92%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah pada Rancangan Strategis

Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis



organisasi termasuk di dalamnya realisasi kinerja tujuan untuk mengukur kinerja selama 5 tahun. Pengukuran realisasi kinerja dengan mengacu target jangka menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6  
 Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Capaian		
			2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	6	7	8
1	<b>Tujuan</b> Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<b>Indikator Tujuan :</b> Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas	66%	0	0	66%
	<b>Sasaran</b> Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	<b>Indikator Sasaran :</b> Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	95%	94,07%	100%	90,76%

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/ Internasional**

Dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Standar Nasional Lainnya Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dengan target dan realisasi Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional sebagaimana tabel berikut:



Tabel. 3.7  
Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
			Standar Nasional	Provinsi Kaltim	Kabupaten/Kota Samarinda	Capaian %
1	2	3	4	5	6	5=4/5*100
Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		<b>Indikator Tujuan :</b> Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas	Tidak Ada	Tidak Ada	66,65%	100%
	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	<b>Indikator Sasaran :</b> Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Tidak Ada	Tidak Ada	95,54%	95,54%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tidak dapat dibandingkan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

#### 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja.

Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sampai dengan tahun 2025 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut:



**Tujuan** “*Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*” dengan indikator kinerja “*Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas*” capaiannya sebesar 66,65% dari target pada Renstra sebesar 66,65% atau sebesar 100%

**Sasaran strategis** yaitu “*Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial*” dengan indikator kinerja “*Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial*” bisa dikatakan **berhasil** yakni telah tercapai sebesar 90,76% atau kurang dari (4,24%) dari target capaian kinerja 95% yang diperjanjikan.

Hal ini dikarenakan upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Politik Dalam Negeri, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial berhasil dilaksanakan dengan baik.

Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial di Kota Samarinda pada tahun 2025 mengalami **keberhasilan**, hal ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah melakukan tindakan preventif terhadap peningkatan Pembinaan. Beberapa faktor penyebab keberhasilan diantaranya :



1. Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional pada Misi 1 (satu) yakni Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
3. Adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif lainnya;
4. Adanya koordinasi dengan aparat Kepolisian, Dandim dan Kejaksaan dalam menangani masalah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi.
5. Pelaksana kegiatan memiliki perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
6. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas yang bagus dalam pelaksanaan program/kegiatan, hingga pelaksanaannya bisa terarah dan relevan antara target dan pagu anggaran yang tersedia.
7. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung yang selaras dengan usaha pencapaian target masing masing kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan capaian kinerja indikator Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial, terdapat beberapa faktor (**kendala/kegagalan**) yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025, antara lain:

1. Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
2. Waktu APBD-Perubahan yang sangat dekat dengan akhir tahun anggaran.



3. Adanya Perubahan Perwali yang membutuhkan waktu untuk perubahan SK yang diterbitkan.
4. Adanya Perubahan pada pihak ke 3 tentang kenaikan harga pengadaan barang.
5. Adanya penetapan jenis target kinerja dan jumlah volume yang kurang tepat, dimana dalam realisasi pelaksanaannya jenis dan volume yang dihasilkan berbeda, sehingga menyebabkan ada ketidaksesuaian antara target dengan realisasi.

Untuk menghadapi hambatan diatas, solusi yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial khususnya pemanfaatan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi antar Bidang.

Meskipun nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Samarinda belum sesuai dengan target nilai Laporan Kinerja (LKjIP), namun tetap berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dan pencarian solusi. Adapun rencana *tindak lanjut/solusi* yang telah dilakukan diantaranya:

1. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja, agar saat proses penyusunan dokumen perencanaan yang sifatnya turunan mereka tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada.
2. Mengintensifkan rapat internal di lingkungan OPD untuk mengevaluasi capaian kinerja masing-masing.
3. Setiap pelaksana kegiatan atau penyusun rencana kegiatan mengetahui dan memahami dengan jelas dan detil terkait dasar dan tujuan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga pada saat membuat atau menentukan indikator dan target kerjanya bisa tepat, akurat dan



rasional yang kedepannya akan mempermudah disaat proses penjabaran ke dalam kegiatan (penyusunan rincian belanja).

Perlu ada jaminan kepastian dalam penetapan/pemberian pagu anggaran kepada OPD, sering terjadi keadaan di OPD dimana target kinerja dan anggaran dalam suatu dokumen berbeda dengan target dalam dokumen turunannya, karena ternyata pagu anggaran yang dikucurkan pada OPD oleh Pemerintah Kota jauh lebih kecil dari pagu yang diminta atau ditargetkan oleh OPD, sehingga mau tidak mau perlu ada pengurangan target dan anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan. Dalam hal ini karena sangat terkait dengan adanya peningkatan atau penurunan pendapatan dan belanja dalam APBD tahun berjalan.

#### **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

Dari keseluruhan pagu anggaran perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 sebesar Rp. **15.484.603.530,-** (*lima belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah*) dan terealisasi sebesar 91,14% atau sebesar Rp. **14.113.217.836,-** (*empat belas milyar seratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*), dengan demikian dapat diketahui bahwa selama periode 2025 alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis, sesuai yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun 2025-2029 dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Persentase penyerapan anggaran pada masing-masing program yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 yang mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja seperti pada tabel berikut :



Tabel. 3.8  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%) Tahun 2023	Tingkat Efisiensi (%)	Penyerapan Anggaran (%) Tahun 2024	Tingkat Efisiensi (%)	Penyerapan Anggaran (%) Tahun 2025	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	100%	80,24%	19,76%	96,85%	3,15%	91,14%	8,86%
<b>Total Rata-rata Efisiensi Penggunaan Anggaran</b>								<b>31,77%</b>

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Dari uraian pada table diatas tergambar kondisi pencapaian indikator kinerja sasaran tingkat capaiannya Tahun 2023 efisiensi anggaran sebesar 19,76%, Tahun 2024 efisiensi anggaran sebesar 3,15% sedangkan untuk Tahun 2025 efisiensi anggaran sebesar 7,41% rata-rata capain indikator kinerja sasaran 31,77% hampir semua perbandingan di tiga tahun penggunaan anggaran efisiensi.

Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 yang mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja seperti pada tabel berikut :



Tabel. 3.9  
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Tahun	Tingkat Capaian					
			Melampaui Target		Sesuai Target		Tidak Mencapai Target	
			Target Capaian	Realisasi %	Target Capaian	Realisasi %	Target Capaian	Realisasi %
1	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Tahun 2023	100%	0%	100%	0%	100%	94.07%
		Tahun 2024	100%	0%	100%	100%	100%	0%
		Tahun 2025	95%	0%	95%	0%	95%	90,76%

Tabel. 3.10  
Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Anggaran Tahun 2025  
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian (%)	Target Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Penyerapan Anggaran (%)	
Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	95%	90,76%	95,54%	15.484.603.530	14.113.217.836	91,14%	4,4%

**KETERANGAN :**

*Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%*

*Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program / kegiatan yang mendukung Indikator.*

*Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran*



Dari Tabel diatas Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda sepanjang Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata sebesar 95,54%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran berdasarkan tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Terdapat tingkat efisiensi sebesar 4,4% dimana pada tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar 91,14% yaitu dari alokasi anggaran Rp. 15.484.603.530,- direalisasikan sebesar Rp. 14.113.217.836,-. Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran dengan sasaran berupa “Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial”, dan indikator kinerja yang dianggap mencapai optimal yaitu pada Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter, Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial, hal tersebut disebabkan karena adanya Perubahan Perwali tentang SK Tim dan efisiensi waktu yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan.

#### **7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah membuat program guna mendukung indikator kinerja utama. Rencana program dan indikator kinerja yang disusun pada dokumen Renstra telah dirumuskan agar selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Berikut realisasi kinerja program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025.

##### **1) Penjelasan program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana berikut:**



- ❖ Indikator Kinerja pada Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan target kinerja 100% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.11

Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja “Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan” antara tahun 2024 dengan tahun 2025, belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% realisasi capaian sebesar 100% sedangkan untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% realisasi capaian sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan” antara tahun 2025, tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.12

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi dari Tahun 2023 s/d Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	94.07%	100%	100%



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada tahun 2025 menunjukkan *keberhasilan*. Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 dan tahun 2024 menunjukkan *keberhasilan* sesuai target yakni sebesar 100% sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 94,07%, atau sebesar (5,93%). Tingkat keberhasilan pada Program Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan, hal ini tidak terlepas dari upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan kepada berbagai unsur masyarakat secara aktif pada tahun 2025.

**c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target Renstra 2025-2029**

Indikator kinerja Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2025 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2024, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2023. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini:

Tabel 3.13  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2025-2029	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025	Tingkat Pencapaian (%)
<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada tahun 2025 dibandingkan dengan target renstra dari



periode renstra 2025 – 2029 sebesar 100% telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat pencapaian sebesar 100%.

❖ Indikator Kinerja pada Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025**

Tabel 3.14  
**Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	85,99%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja “Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik” pada tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan tahun 2024 capaian target mengalami penurunan sebesar 85,99% atau sebesar (14,01) dari target capaian 100%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik” antara tahun 2025, tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :**



Tabel : 3.15  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  
Tahun 2025 dengan Realisasi dari Tahun 2023 s/d Tahun 2024**

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	99,2%	85,99%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada tahun 2025 menunjukkan *keberhasilan*. Sosialisasi Bidang Politik Dalam Negeri pada tahun 2025 mengalami *peningkatan* sebesar 100% dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 85,99% atau sebesar (14,01%) dan capaian indikator kinerja pada tahun sebelumnya yakni tahun 2023 sebesar 99,2% atau sebesar (0,8%) mengalami penurunan. Tingkat keberhasilan sesuai dengan capaian indikator pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, hal ini tidak terlepas dari upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pendidikan Politik Dalam Negeri kepada seluruh anggota Partai Politik dan masyarakat secara aktif pada tahun 2025.

**c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target Renstra 2025-2029**

Indikator kinerja Presentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja pada tahun 2025 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2024, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2023. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini:



Tabel 3.16  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2025-2029	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025	Tingkat Pencapaian (%)
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator Presentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada tahun 2025 dibandingkan dengan target Renstra dari periode Renstra 2025 – 2029 sebesar 100% telah terealisasi sebesar 100% dengan tingkat pencapaian sebesar 100%.

- ❖ Indikator Kinerja pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025**

Tabel 3.17  
Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja “Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif” antara tahun 2024 dengan tahun 2025, realisasi mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana tahun 2024



ditargetkan sebesar 100% realisasinya sebesar 100% sedangkan untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% realisasinya sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**” antara tahun 2025, tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 3.18  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  
Tahun 2025 dengan Realisasi dari Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100%	90.73%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa “Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif” pada tahun 2025 menunjukkan *keberhasilan*. Antara tahun 2025 dan tahun 2024, sosialisasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terealisasi sebesar 100% mengalami *peningkatan* dibandingkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 90,73% (9,27%). Tingkat keberhasilan pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan hal ini dikarenakan adanya upaya peningkatan peran serta ormas dalam Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang telah melakukan berbagai cara guna pemberdayaan, pengawasan dan peningkatan kualitas dan kapabilitas ormas antara lain melaksanakan Pendidikan politik untuk ormas dan jambore ormas bagi ormas yang aktif dan terdaftar. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yakni banyak ormas yang belum melakukan pendaftaran sehingga mengakibatkan pengawasan terhadap ormas menjadi terkendala.



**c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target Renstra 2025-2029**

Indikator kinerja “Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif” adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2025 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2024, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2023. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini :

Tabel 3.19  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Akhir RENSTRA 2025-2029</b>	<b>Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025</b>	<b>Tingkat Pencapaian (%)</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator kinerja “Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif” pada tahun 2025 dibandingkan dengan target renstra dari periode renstra 2025 – 2029 sebesar 100% telah terealisasi sebesar 100% dengan tingkat pencapaian sebesar 100%.

❖ Indikator Kinerja pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan capaian kinerja 100% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025**



Tabel 3.20  
Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja “Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan” antara tahun 2024 dengan tahun 2025, mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% realisasi capaian sebesar 100% sedangkan untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% realisasi capaian sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “**Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan**” antara tahun 2025, tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.21  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  
Tahun 2025 dengan Realisasi dari Tahun 2023 s/d Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	94,53%	100%	100%



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan pada tahun 2025 menunjukkan *keberhasilan*. Pada tahun 2025 dan tahun 2024, pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar 100% mengalami *peningkatan* dibandingkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 94,53% (5,47%). Tingkat keberhasilan capaian indikator pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, hal ini tidak terlepas dari upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam melaksanakan sosialisasi secara intens dengan kelompok organisasi seperti F4GN dan FKUB dan unsur masyarakat lain untuk meminimalisir munculnya permasalahan maupun konflik dari berbagai suku.

**c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target Renstra 2025-2029**

Indikator kinerja Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2025 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2024, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2023. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut :



Tabel 3.22  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2025-2029	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025	Tingkat Pencapaian (%)
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan pada tahun 2025 dibandingkan dengan target renstra dari periode renstra 2025 – 2029 sebesar 100% telah terealisasi sebesar 100% dengan tingkat pencapaian sebesar 100%.

- ❖ Indikator Kinerja pada Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

Tabel 3.23  
Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	%	100%	100%	77,68%	77,68%



Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja “Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan” antara tahun 2024 dengan tahun 2025, belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% realisasi capaian sebesar 100% sedangkan untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% realisasi capaian sebesar 77,68% atau sebesar (22,32%) kurang dari capaian kinerja yang ditargetkan 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “**Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan**” antara tahun 2025, tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 3.24  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  
Tahun 2025 dengan Realisasi dari Tahun 2023 s/d Tahun 2024**

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100%	18,30%	100%	77,68%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan pada tahun 2025 menunjukkan *ketidak berhasilan*. Pada tahun 2025 pembinaan di Bidang Kewaspadaan Nasional ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 77,68% atau sebesar (22,32%) mengalami *penurunan* dibandingkan pada tahun 2024 yang mencapai target 100%. Capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 18,30% atau sebesar (81,7%) juga mengalami penurunan. Kondisi keamanan yang terpelihara akan mampu memberikan dampak langsung pada pembangunan di Kota Samarinda dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Tingkat keberhasilan kurang dari capaian indikator pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, hal ini disebabkan anggaran



kegiatan hibah lebih besar dari pada anggaran sub kegiatan koordinasi/sosialisasi dibidang Kewaspadaan Nasional.

**c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target Renstra 2025-2029**

Indikator kinerja Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2025 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2024, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2023. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini :

Tabel 3.25  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2025-2029	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025	Tingkat Pencapaian (%)
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100%	77,68%	77,68%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan pada tahun 2025 dibandingkan dengan target renstra dari periode renstra 2025 – 2029 sebesar 100% telah terealisasi sebesar 77,68% atau sebesar (22,32%) kurang dari capaian kinerja yang ditargetkan 100%.

**2) Rencana Tindak Lanjut/Upaya Perbaikan**

Secara garis besar realisasi kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 telah tercapai. Dibandingkan dengan tahun lalu capaian kinerja sasaran ada yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Namun demikian diharapkan di tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih meningkat lagi.

- a. Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :



- 1) Kegiatan Pembinaan Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka perlu dilaksanakan lebih baik lagi dan lebih profesional dalam hal pendanaan dan perekrutan peserta. Kegiatan ini sangat penting untuk terus diselenggarakan karena bermanfaat untuk mendidik generasi muda agar lebih disiplin, paham akan wawasan kebangsaan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.
  - 2) Perlunya penyusunan pengukuran Indeks Ketahanan Ideologi untuk mengetahui kondisi masyarakat Kota Samarinda dalam hal cinta tanah air.
- b. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik :**
- 1) Perlunya peningkatan kegiatan penguatan pendidikan politik kepada unsur masyarakat, khususnya generasi muda.
  - 2) Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) partai politik terhadap bantuan keuangan partai politik melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- c. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif :**
- 1) Perlu lebih ditingkatkan lagi kegiatan pengawasan terhadap seluruh Ormas yang berada di Kota Samarinda dengan melakukan pendataan untuk yang masih aktif diupayakan dilakukan sosialisasi agar bisa melakukan pendaftaran Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- d. Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan :**



- 1) Perlu dilakukan upaya kreatif dalam memelihara dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui kerjasama antar kelompok masyarakat baik antar suku, agama, golongan, dan ras.
  - 2) Persyaratan dan tata cara pendirian tempat ibadah juga menjadi perhatian serius guna menghindari terjadinya konflik, perlu dilakukan sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur pendirian tempat ibadah.
  - 3) Kegiatan pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba
- e. Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan :
- 1) Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini, penanganan konflik dan pendidikan wawasan kebangsaan guna meminimalisir adanya konflik di masyarakat
  - 2) Peningkatan kemampuan, analisa dan pelaporan intelijen untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial di masyarakat perlu terus dikembangkan.
  - 3) Keterlibatan urusan pemerintahan umum dan stakeholder terkait pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda juga perlu lebih ditingkatkan lagi.

## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Dari keseluruhan pagu anggaran perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 sebesar Rp. **15.484.603.530,-** (*lima belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah*) dan terealisasi sebesar 91,14% atau sebesar Rp. **14.113.217.836,-** (*empat belas milyar seratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*).

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terdiri dari 5 program, 5 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.



Secara rinci jumlah anggaran dan capaian kinerja serta realisasi anggaran Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam penggunaan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.26  
 Realisasi Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik  
 Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025		
					Keuangan	Capaian Keu%	Capaian Kinerja %
1	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<b>100%</b>	<b>3.813.860.000</b>	<b>3.314.940.452</b>	<b>86,91%</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1200 orang</b>	<b>3.813.860.000</b>	<b>3.314.940.452</b>	<b>86,91%</b>	<b>100%</b>
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800 orang	278.500.000	244.573.788	87,82%	100%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 laporan	1.340.000	1.312.000	97,91%	100%
	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 dokumen	123.169.000	102.839.060	83,49%	100%
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	300 orang	3.334.651.000	2.891.510.744	86,71%	100%
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	42 orang	76.200.000	74.704.860	98,04%	100%
<b>Total Capaian Kinerja dan Anggaran Program</b>				<b>3.813.860.000</b>	<b>3.314.940.452</b>	<b>86,91%</b>	<b>100%</b>



2	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	5.028.287.905	4.818.978.585	95,84%	100%
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>1200 orang</b>	<b>5.028.287.905</b>	<b>4.818.978.585</b>	<b>95,84%</b>	<b>100%</b>
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	3.963.467.905	3.779.036.905	95,35%	100%
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2500 orang	911.996.000	889.933.393	97,58%	100%



	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 laporan	152.824.000	150.008.287	98,16%	100%
<b>Total Capaian Kinerja dan Anggaran Program</b>				<b>5.028.287.905</b>	<b>4.818.978.585</b>	<b>95,84%</b>	<b>100%</b>
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100%	220.130.375	199.625.489	90,69%	100%
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah Ormas yang dibina</b>	45 Ormas	220.130.375	199.625.489	90,69%	100%
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 orang	118.671.500	109.413.849	92,20%	100%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 laporan	101.458.875	90.211.640	88,91%	100%
<b>Total Capaian Kinerja dan Anggaran Program</b>				<b>220.130.375</b>	<b>199.625.489</b>	<b>90,69%</b>	<b>100%</b>
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	1.139.995.250	1.066.706.321	93,57%	100%



	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	45 laporan	1.139.995.250	1.066.706.321	93,57%	100%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 orang	100.453.250	85.293.374	84,91%	100%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 laporan	1.039.542.000	981.412.947	94,41%	100%
<b>Total Capaian Kinerja dan Anggaran Program</b>				<b>1.139.995.250</b>	<b>1.066.706.321</b>	<b>93,57%</b>	<b>100%</b>
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100%	5.282.330.000	4.712.966.989	89,22%	77,68%
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani</b>	24 kasus	5.282.330.000	4.712.966.989	89,22%	100%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1500 orang	3.863.480.000	3.830.066.250	99,14%	47,33%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	14 laporan	83.950.000	54.926.000	65,43%	85,71%



Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	1.334.900.000	827.974.739	62,03%	100%	
<b>Total Capaian Kinerja dan Anggaran Program</b>			<b>5.282.330.000</b>	<b>4.712.966.989</b>	<b>89,22%</b>	<b>77,68%</b>	
<b>Jumlah Capaian Kinerja dan Alokasi Anggaran</b>			<b>15.484.603.530</b>	<b>14.113.217.836</b>	<b>91,14%</b>	<b>95,31%</b>	

Pelaksanaan 5 Program, 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda pada tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang direncanakan yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan pagu sebesar Rp. **3.813.860.000,-** terealisasi sebesar Rp. **3.314.940.452,-** dengan capaian keuangan 86,91% dan capaian kinerja terealisasi 100%, hal ini dipengaruhi adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan adanya penambahan anggaran yang tidak dipakai ;
2. Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan pagu sebesar Rp. **5.028.287.905,-** terealisasi sebesar Rp. **4.818.978.585,-** dengan capaian keuangan 95,84% dan capaian kinerja terealisasi 100%, hal ini dikarenakan penyerapan anggaran sesuai kebutuhan di akhir tahun ;
3. Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan pagu sebesar Rp. **220.130.375,-** terealisasi sebesar Rp. **199.625.489,-** dengan capaian keuangan 90,69% dan capaian kinerja



teralisasi 100%, hal ini dikarenakan penyerapan anggaran sesuai kebutuhan di akhir tahun ;

4. Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanthapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan pagu sebesar Rp. **1.139.995.250,-** terealisasi sebesar Rp. **1.066.706.321,-** dengan capaian keuangan 93,57% dan capaian kinerja terealisasi 100%, hal ini dikarenakan penyerapan anggaran sesuai kebutuhan di akhir tahun ;
5. Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanthapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan pagu sebesar Rp. **5.282.330.000,-** terealisasi sebesar Rp. **4.712.966.989,-** dengan capaian keuangan 89,22% dan capaian kinerja terealisasi 77,68%, hal ini dipengaruhi adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan Pergeseran anggaran yang tidak disetujui serta adanya anggaran kegiatan hibah lebih besar dari pada anggaran sub kegiatan koordinasi/sosialisasi dibidang Kewaspadaan Nasional.;

## 2. Efisiensi Penggunaan Anggaran Berdasarkan Sasaran Kinerja

Analisis penggunaan anggaran sesuai sasaran kinerja dengan program-program pendukung dalam pencapaiannya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27  
 Efisiensi Penggunaan Anggaran Berdasarkan Sasaran Kinerja  
 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda  
 Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Capaian (%)	Efisiensi Biaya	Kategori
1	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<b>3.813.860.000</b>	<b>3.314.940.452</b>	<b>86,91%</b>	<b>13,09%</b>	
<b>Total Anggaran per Program</b>				<b>3.813.860.000</b>	<b>3.314.940.452</b>	<b>86,91%</b>	<b>13,09%</b>	<b>Baik</b>



No.	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Capaian (%)	Efisiensi Biaya	Kategori
2	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	5.028.287.905	4.818.978.585	95,84%	4,16%	
<b>Total Anggaran per Program</b>				<b>5.028.287.905</b>	<b>4.818.978.585</b>	<b>95,84%</b>	<b>4,16%</b>	<b>Sangat Baik</b>
3	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	220.130.375	199.625.489	90,69%	9,31%	
<b>Total Anggaran per Program</b>				<b>220.130.375</b>	<b>199.625.489</b>	<b>90,69%</b>	<b>9,31%</b>	<b>Sangat Baik</b>
4	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	1.139.995.250	1.066.706.321	93,57%	6,43%	
<b>Total Anggaran per Program</b>				<b>1.139.995.250</b>	<b>1.066.706.321</b>	<b>93,57%</b>	<b>6,43%</b>	<b>Sangat Baik</b>



No.	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Capaian (%)	Efisiensi Biaya	Kategori
5	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	5.282.330.000	4.712.966.989	89,22%	10,78%	
<b>Total Anggaran per Program</b>				<b>5.282.330.000</b>	<b>4.712.966.989</b>	<b>89,22%</b>	<b>10,78%</b>	<b>Baik</b>

### **Inovasi**

Pada tahun 2025 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menginisiasi inovasi, di antaranya:

- a) **Kemah Kebangsaan**
- b) **Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos)**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Pada uraian Bab III terdapat bahwa : 1 (satu) indikator sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja program dapat dicapai dengan **SANGAT BAIK**.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah berupaya memberikan informasi mengenai pencapaian sasaran yang disajikan melalui hasil dari pengukuran kinerja tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2025 pada indikator kinerja Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial, belum semua program memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95% sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 95,31% atau (4,69%) kurang dari target capaian 100% sehingga capaian IKU mencapai 90,54% dari target IKU 95%.
2. Penyerapan anggaran Perubahan pada tahun 2025 pada 5 (lima) Program dan 5 (lima) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan sebesar Rp. **14.113.217.836,-** atau sebesar **91,14%** dari total anggaran Rp. **15.484.603.530,-**

#### **4.2 RENCANA TINDAK LANJUT**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda akan melakukan perbaikan dan koordinasi lebih lanjut terhadap capaian indikator yang belum dapat terlaksana. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan atas sistem pengukuran kinerja yang perlu dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi secara intensif antar bidang dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.



- b. Mengoptimalkan efisiensi APBD Pemerintah Kota Samarinda melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada 'outcome sehingga tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat tercapai.
- c. Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan melakukan berbagai sosialisasi atau melalui forum-forum yang sudah dibentuk.
- d. Tingginya komitmen dari semua pihak yang terkait serta koordinasi, kolaborasi dan harmonisasi yang baik antara Pemerintah Kota Samarinda, TNI, POLRI, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sehingga meningkatnya kondusifitas di wilayah Kota Samarinda.

Mudah-mudahan perbaikan ditahun berikutnya akan lebih meningkatkan kapasitas kelembagaan baik itu sumber daya manusianya, sarana prasarana dan pendanaan yang cukup. Demikian pula dapat diharapkan meningkatkan capaian yang lebih baik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mengucapkan terima kasih pada segenap jajarannya dan pada inspektorat daerah atas koreksi-koreksi ataupun penilaian yang diberikan dalam pembuatan LKJIP ini agar lebih baik, karena LKJIP ini adalah suatu kewajiban setiap OPD sebagai bahan pertanggung jawaban publik yang transparan dan akuntabel disamping sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Meskipun kami menyadari dalam penyusunan LKJIP ini masih ada saja kekurangan, namun demikian kami akan berusaha untuk lebih menyempurnakannya.

Samarinda, 9 Februari 2026

Tim Penyusun  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kota Samarinda

